



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2008

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME**

WALIKOTA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dengan semakin kompleksnya permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan reklame, maka demi efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak Reklame dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpjakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000;

8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman cara penghitungan Nilai Sewa Reklame;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Bangunan;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-bangunan;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1988 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Yogyakarta.
5. Kantor Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut KPPD adalah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta.
6. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dipungut daerah atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan / atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali dilakukan oleh pemerintah.
8. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Jenis naskah adalah jenis reklame yang memuat isi naskah dari reklame.
10. Lokasi status tanah adalah status kepemilikan atau pengelolaan tanah tempat diselenggarakannya reklame.

11. Reklame nama usaha adalah reklame yang semata-mata mencantumkan naskah nama usaha yang dimiliki penyelenggara reklame sendiri, dan ditempatkan pada tanah persil atau tanah negara di muka tempat usaha tersebut dilaksanakan.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB II

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 2

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame (NSR)

Pasal 3

Tarif pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame

Bagian Pertama

Jenis Reklame Papan/Billboard, Megatron, Trivision, Baliho, Cahaya dan Kain

Pasal 4

- (1) Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$NSR = \left(\left(\frac{HDPP}{365} \right) \times \text{LamaPemasangan} + \text{NilaiStrategis} \right) \times \text{IndeksJenisNaskah\& LokasiStatusTanah}$$

- (2) Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Indeks Jenis Naskah dan Lokasi Status Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Lama pemasangan atau jangka waktu penyelenggaraan reklame adalah harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
- (5) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor-faktor antara lain :
 - a. Kelompok Jalan
 - b. Luas reklame
 - c. Sudut pandang
 - d. Harga Dasar Strategis
- (6) Untuk menghitung Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dan skor masing-masing faktor pada ayat (5) huruf a, b, dan c dikalikan dengan Harga Dasar Strategis.
- (7) Bobot dan skor masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, b, dan c adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (8) Harga Dasar Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (9) Hasil perhitungan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tabel adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Reklame papan nama bersponsor dengan keluasan naskah sponsor lebih dari 20% luas reklame dihitung dengan indeks jenis naskah rokok atau non rokok.
- (2) Reklame di tanah persil yang menjorok pada tanah negara, dihitung dengan indeks lokasi status tanah negara.

Bagian Kedua

Jenis Reklame Melekat (Stiker), Selebaran, Berjalan Termasuk Pada Kendaraan, Udara, Suara, Film/Slide dan Peragaan

Pasal 6

Nila Sewa Reklame dihitung berdasarkan :

- a. Jenis
- b. Ukuran
- c. Lama penyelenggaraan

Pasal 7

Besarnya Nilai Sewa Reklame adalah sebagai berikut :

- a. Reklame melekat

No	Ukuran	Jumlah Lembar	Lama Pemasangan	NSR
1	2	3	4	5
1	s.d 1/4 m ²	s.d 10 lembar	Maksimal 1 minggu	Rp. 200.000,-
2	> 1/4 s.d 1/2 m ²	s.d 10 lembar	Maksimal 1 minggu	Rp. 400.000,-

- b. Reklame Selebaran

No	Ukuran	Jumlah Lembar	Lama Pemasangan	NSR
1	2	3	4	5
1	s.d 1/4 m ²	s.d 50 lembar	Maksimal 1 minggu	Rp. 100.000,-
2	> 1/4 s.d 1/2 m ²	s.d 50 lembar	Maksimal 1 minggu	Rp. 200.000,-

- c. Reklame Berjalan

- 1) Kendaraan Tidak Bermotor

Harian/m ²	Mingguan/m ²	Bulanan/m ²	Triwulanan/m ²	Semesteran/m ²	Tahunan/m ²
1	2	3	4		5
Rp. 2000	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 60.000	Rp. 120.000	Rp. 240.000

- 2) Kendaraan Bermotor

Harian/m ²	Mingguan/m ²	Bulanan/m ²	Triwulanan/m ²	Semesteran/m ²	Tahunan/m ²
1	2	3	4		5
Rp. 12.500,-	Rp. 25.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 200.000	Rp. 400.000

- d. Reklame Udara

Nilai Sewa Reklame : Rp. 100.000 per hari

- e. Reklame Suara : Rp. 5.000,- per penyelenggaraan per hari

- f. Reklame Film/slide

- 1) Film : Rp. 3.000,-/15 detik
 - 2) Slide :
 - a) Dengan Suara : Rp.1.000,- sekali tayang
 - b) Tanpa Suara: : Rp. 500,- sekali tayang

- g. Reklame Peragaan : Rp.400.000,- untuk setiap peragaan per hari

BAB III

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP).
- (2) Kepala KPPD menerbitkan NPWP secara jabatan, apabila penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN SPTPD

Pasal 9

- (1) Bentuk dan isi SPTPD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
- (2) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), satu untuk diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Daerah sedangkan yang lainnya untuk arsip wajib pajak

Pasal 10

- (1) Wajib pajak setelah menerima formulir SPTPD beserta tanda terimanya harus mengisi dengan benar sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disediakan.
- (2) Setelah SPTPD diisi oleh wajib pajak, dijadikan satu dengan berkas permohonan dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Daerah.
- (3) SPTPD yang tidak diserahkan dan telah diberi Surat Peringatan/Surat Teguran, maka akan dikenakan penetapan secara jabatan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN ATAU PENUNDAAN SERTA SYARAT-SYARATNYA

Pasal 11

- (1) Tata cara pembayaran angsuran dan atau penundaan pembayaran atas ketetapan pajak adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib pajak mengajukan Surat Permohonan Angsuran dan atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Walikota;
 - b. Mengisi surat perjanjian angsuran dan atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh KPPD dan ditandatangani oleh wajib pajak sendiri yang berkepentingan dan diketahui/disahkan oleh Kepala KPPD;
 - c. Apabila wajib pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Angsuran dan atau Penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (2) Syarat-syarat pembayaran angsuran dan atau penundaan :
 - a. diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo;
 - b. menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan atau penundaan;
 - c. menyatakan besarnya jumlah pajak yang dimohonkan untuk diangsur dan atau ditunda pembayarannya.
- (3) Pembayaran angsuran dan atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi jenis reklame yang bersifat insidental.

Pasal 12

Walikota berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan wajib pajak untuk mengangsur dan atau menunda pembayaran.

BAB VI

TANDA BUKTI PEMBAYARAN DAN BUKU PENERIMAAN PAJAK

Pasal 13

Tanda bukti pembayaran adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

Buku Penerimaan Pajak adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

BAB VII

FORMULIR PENAGIHAN PAJAK SEBAGAI MEDIA SETORAN

Pasal 15

Bentuk dan isi formulir yang digunakan sebagai sarana penagihan pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBAAN PAJAK

Pasal 16

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak mengajukan Surat Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan kepada Walikota dengan tembusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah;
- b. Keringanan pajak dapat diberikan apabila penyelenggaraan reklame terkait dengan kegiatan yang mengandung misi pendidikan, kesenian/kebudayaan, olah raga, keagamaan dan ikut mensukseskan program Pemerintah;
- c. Keringanan pajak reklame nama usaha murni memperhatikan kemampuan pengusaha dengan keringanan maksimal 25% (dua puluh lima persen);
- d. Besarnya keringanan atau pembebasan pajak reklame selain nama usaha murni, ditentukan oleh jenis misi sosial dan skala kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran X;
- e. Surat Keputusan menolak atau menerima atas permohonan permintaan pengurangan, keringanan dan pembebasan ditandatangani oleh Kepala KPPD untuk ketetapan pajak sampai dengan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Surat Keputusan menolak atau menerima atas permohonan permintaan pengurangan, keringanan dan pembebasan ditandatangani oleh Wakil Walikota untuk ketetapan pajak di atas Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- g. Dalam hal reklame insidentil yang akan diselenggarakan sedang mengajukan surat permohonan keringanan atau pembebasan pajak, dan belum mendapat Surat Keputusan dari Wakil Walikota atau Kepala KPPD, maka penyelenggara wajib menyerahkan lebih dahulu pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai ketetapan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Keterlambatan atas pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak setelah tanggal 1 Juli 2008 akan ditetapkan pajaknya sesuai Peraturan Walikota ini
- (2) Penyampaian SPTPD sebelum tanggal 1 Juli 2008 maka perhitungan ketetapan pajak masih menggunakan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame.
- (3) Penyampaian SPTPD yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2008 maka perhitungan ketetapan pajak menggunakan Peraturan Walikota ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2008

Agar supaya setiap orang mengetahuinya mengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 13 Mei 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal 13 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH TAHUN 2008 NOMOR 26 SERI D

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 23 TAHUN 2008
TANGGAL : 13 Mei 2008

TABEL HARGA DASAR PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN PER TAHUN

NO.	JENIS REKLAME	HARGA DASAR PER M2
1.	Papan/Billboard/Cahaya Neon Box	220.000,-
2.	Megatron	5.500.000,-
3.	Trivision	550.000,-
4.	Baliho	220.000,-
5.	Cahaya Neon Sign	250.000,-
6.	Kain	10.000,-

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 23 TAHUN 2008
TANGGAL : 13 Mei 2008

TABEL INDEKS JENIS NASKAH DAN STATUS TANAH LOKASI

Jenis Reklame	Tanah Negara			Tanah Persil di atas Gedung			Tanah Persil di Halaman & Facade			Tanah Persil di Dalam Ruang		
	Rokok	Non Rokok	Nama Usaha	Rokok	Non Rokok	Nama Usaha	Rokok	Non Rokok	Nama Usaha	Rokok	Non Rokok	Nama Usaha
Megatron, Trivision, Cahaya, Papan/Billboard, Baliho	10	2,2	1,5	6	1,7	1,1	5	1,6	1,1	3	1,4	1
Spanduk, Umbul-umbul, Rontek dan sejenisnya	1,4	1,2	1,1	1,2	1	0,9	1,1	0,9	0,8	1	0,8	0,7

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 23 TAHUN 2008
TANGGAL : 13 Mei 2008

TABEL BOBOT DAN SKOR FAKTOR-FAKTOR PENENTU NILAI STRATEGIS

No.	Kelompok Jalan		Luas Reklame per sisi		Sudut Pandang	
	Bobot 50%	Skor	Bobot 30%	Skor	Bobot 20%	Skor
1.	Kelompok Jalan A	10	$\geq 32 \text{ m}^2$	10	> 4 sisi	10
2.	Kelompok Jalan B	8	16 m^2 s.d. < 32 m^2	6	Empat sisi	8
3.	Kelompok Jalan C	6	< 16 m^2	2	Tiga Sisi	6
4.	Kelompok Jalan D	4			Dua Sisi	4
5.					Satu Sisi	2

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 23 TAHUN 2008
TANGGAL : 13 Mei 2008

TABEL HARGA DASAR STRATEGIS

NO.	KELOMPOK JALAN					HARGA DASAR
(1)	(2)					(3)
1.	KELOMPOK JALAN A 1. Pangeran Mangkubumi 2. Jend. Ahmad Yani 3. Malioboro 4. Trikora 5. Abu Bakar Ali	6. Kleringen 7. Panembahan Senopati 8. Laksda Adisucipto 9. Jend. Sudirman 10. Jend. Urip Sumoharjo	11. Brigjen Katamso 12. Magelang 13. C. Simanjuntak 14. KH. Ahmad Dahlan 15. Pangeran Diponegoro	16. Cik Di Tiro 17. Suroto 18. Yos Sudarso 19. Mataram 20. Suryotomo	21. Perwakilan 22. Suryatmajan 23. Alun-alun Lor 24. Alun-alun Kidul	95.000,-
2.	KELOMPOK JALAN B 1. Kyai Mojo 2. Kusumanegara 3. Sultan Agung 4. RE.Martadinata 5. Gejayan 6. A.M Sangaji 7. Prof. Yohanes 8. Dr.Wahidin S 9. Dr Sutomo	10. Mayjen Sutoyo 11. M.T. Haryono 12. D.I. Panjaitan 13. Letjen S parman 14. Wahid Hasyim 15. Hos Cokroaminoto 16. Pasar Kembang 17. Ketandan 18. Jogonegoro	19. Gandekan 20. Bhayangkara 21. Taman Siswa 22. Ngasem 23. Pajeksan 24. Tamansari 25. Ibu Ruswo 26. Kemetiran 27. Beskalan	28. Parangtritis 29. Kol Sugiono 30. Mentri Supeno 31. Kusbini 32. Sosrowijayan 33. Dagen 34. Mojar 35. Pabringan 36. Remujung	37. Sandiloto 38. Sriwedani 39. Limaran 40. Tilarso 41. Prof. Dr. Sardjito 42. Kranggan 43. Lagensari 44. Timoho	90.000,-
3.	KELOMPOK JALAN C 1. Letjen Suprapto 2. Kapten P Tendean 3. Perintis Kemerdekaan 4. Ngeksigondo 5. Sisingamangaraja 6. Ks.Tubun 7. Prawirotaman 8. Gambiran 9. Veteran	10. KebunRaya 11. Imogiri 12. W. Monginsidi 13. Munggur 14. Tentara Pelajar 15. Pakuninggratan 16. Poncowinatan 17. Asem Gede 18. Gedong Kuning	19. Pembela Tanah Air 20. Tentara Rakyat M 21. Sugeng Jeroni 22. Bugisan 23. Suryodiningratn 24. Hayam Wuruk 25. Gajah Mada 26. Empl.Lempuyangan 27. Lempuyangan	28. Ipda.Tut. Harsono 29. Cendana 30. Kenari 31. Gayam 32. Bausasran 33. Juminahan 34. Mas Suharto 35. FM. Noto 36. Tukangan	37. Asrama Patuk Polri 38. Sukun/Mangunsarkoro 39. Tunjung	85.000,-
4.	KELOMPOK JALAN D 1. Bantul	89. Ngadimulyo	147. Bimokurdo	238. Mangkuyudan	329. Gowongan lor	80.000,-

	2. Gowongan Kidul 3. Bumijo Tengah 4. Kemetiran Kidul 5. Sastro Dipurana 6. Lor Pasar 7. Siliran Lor 8. Langenastran Kidul 9. Gamelan Lor 10. Madyosuro 11. Pakaryan 12. Wijilan 13. Suronatan 14. Kadipaten 15. Magangan 16. Patehan Tengah 17. Nagan Kidul 18. Nagasari Kidul 19. Mangkubumen 20. Pujokusuman 21. Bener 22. Trimargo 23. Mon.P. Diponegoro 24. Sangan 25. Iromejan 26. Tribatра 27. LPP 28. Umum Kalipan 29. Juadi 30. Krasak 31. I Dewa Yoman Oka 32. Lawu 33. Jagalan 34. Ronodikdayan 35. Swandanan 36. Sukonandi 37. Kapas I 38. Cendana III 39. Mayang 40. Anggrek 41. Gambir	90. Kleben 91. Gotongroyong I 92. Widuri 93. Demakan 94. Tridarma 95. Candrakirana 96. Sangan III 97. Bimokunting 98. Cipto wiloho 99. Gagak Rimang 100. Wardani 101. Nurhadi 102. Supadi 103. Ungaran 104. Beji 105. Tegal Kemuning 106. Harjono 107. Swandanan III 108. Suykonandi III 109. Cendana I 110. Teratai 111. Wora-wari 112. Tunjung Br 113. Kemuning 114. Sidobali 115. Werkudoro K 116. Tombol 117. Sidodadi 118. Perkutut 119. Noroyono 120. Kemir 121. Madumurti 122. Puntodewo 123. Pareanom 124. Pugeran Barat 125. Jogokaryan 126. Gerilya 127. Madumurti 128. Komplek Minggiran 129. Pisang	148. Sekarwijken 149. Kemakmurran 150. A.Zakir 151. Hadidarsono 152. Ngadika 153. Sunaryo 154. Prau 155. Tegalpanggung 156. Purwangan 157. Swandanan I 158. Sukonandi I 159. Kapas II 160. Suko 161. Cempaka 162. Jl.Menur 163. Kantil 164. Balerejo 165. Klitren 166. Kmpl BmbngS_Mojo 167. Sidobali I 168. Abiyoso 169. Sidoluhur/GK 170. Kel. Baciro 171. TbMltWtn_Timoholl 172. Tirtodipuran 173. Suragaman 174. Prapanca 175. Cuwiri 176. Dukuh 177. Cempakasari 178. Ngadinegaran 179. Madusari 180. Banjar Sari 181. Siwalan 182. Kmpl.Palangan M 183. Gatutkoco 184. Singosaren asri 185. Tegalturi 186. Babaran 187. Gajah	239. Kebondalem 240. Bumijo 241. Damai 242. Cokodipuran 243. Dipowinata 244. Langenarjan Lor 245. Gamelan 246. Mantrigawen 247. P. Mangkurat 248. Mangunegaran Wetan 249. Secodiningratan 250. Kadipaten Lor 251. Sidomukti 252. HalamanTaman 253. PatehanKulon 254. Nagan Kulon 255. Lombaningratan 256. Ngadiwinatan 257. Kricak 258. Gotongroyong 259. Pasiraman 260. Singojaya 261. Masjid Pakuncen 262. Gampingan Br. II 263. KomplMnmTegalrejo 264. Nuri 265. Gondosuli 266. Atmosukarto 267. Dwi Sartika 268. Sangan 269. Mantrijeron 270. Sadewo 271. Resiwiyono 272. Mangga 273. Surami 274. Setiaki 275. tegalmulyo II 276. Sorogenen 277. Glagah Sari 278. Prof.Dr.Soepomo SH	330. Bumijo Kidul 331. Pingit 332. Kemetiran Lor 333. Nitidipuran 334. Ketandan Kidul 335. Siliran kidul 336. Lagenastran Lor 337. Gamelan Kidul 338. Mantrigawen Kidul 339. Kemitbumen 340. Mangunegaran Kulon 341. Nyi Ahmad Dahlan 342. Kadipaten kidul 343. Kesatrian 344. Patehan Lor 345. Gading 346. Nagansari 347. Brontokusuman 348. Puskesmas Gdtnq 349. Manunggal 350. Bengirejotaman 351. Tompean 352. Tegalmulyo 353. Menjangan 354. Petak Br. 355. Demakan 356. Jambon Permahan 357. Amat Jajuli 358. Melati ke Timur 359. sam Ratulangi 360. Sangan II 361. Bimosakti 362. Kusuma 363. Turonggoseto 364. Trimo 365. Suhrtono 366. Sajiono 367. Patimura 368. Suhada 369. HansipKarnowaluyo	
--	---	--	--	---	--	--

	42. Sawit 43. Terbantanan/pncwlo 44. Melati Wetan 45. Hibrida 46. Hastina 47. Widayati Sutarjo 48. Ganesa 49. Patangpuluhan 50. Jetisharjo 51. Tmbs.Bener 52. Terban 53. Kompol Bambang S 54. Mojo 55. Kartini 56. Sangan IV 57. Mutiara 58. Kalisahak 59. Balapan 60. Sareh 61. Sabirin 62. Telomoyo 63. Jayeng Prawiran 64. Tegal Lempuyangan 65. Masjid PA 66. Nototarunan 67. Kapas 68. Cendan II 69. Pengok Kidul 70. Pacar 71. Mawar 72. Cantel 73. Kerto 74. Melati-Sorowajan 75. Otek 76. Pringgodani 77. Yomodipati 78. Bimosari 79. Menukan 80. Wirotomo 81. Pakuncen	130. Durian 131. Singo Mulanjoyo 132. LoanuI 133. Nitikan 134. Tegalgendu 135. Tahunan 136. Basuki 137. MayorLautWiratmo 138. Sidikan 139. P.Purbo 140. Pangeran Tompe 141. Nutfah Pisang 142. Tanjung 143. Kmplk. Kenari 144. Anggrek 145. Jl.Suparman 114. Ki Penjawi 115. Semangu 116. Retnodumilah 117. Ny Pembayun 118. Pakarti 119. Karanglo 120. Palem III 121. Jlagran Lor 122. Wongsodirjan 123. Bumijo Lor 124. Jlagran 125. Gadean 126. Ledok Gondomanan 127. Langenarjan 128. Namburan Kidul 129. Pesindenan 130. Jl. Suryomentaraman 131. Jl. Sawojajar 132. Jl. Musikanan 133. Jl. Agus Salim 134. Jl. Polowijayan 135. Jl. Ngadisuryan 136. Jl. Patehan Kidul 137. Jl. Nagan Tengah	188. Permadi 189. Kap KKO Usman 190. Sidokabul 191. Gambiranom I/GS 192. Kalinyamat 193. Mandungan I 194. WarungBoto 195. Menuju Depo S 196. Celeban 197. Gambirsari 198. Tmbs.Malangan 199. Karangsari 200. Depokan 201. Adisoro I 202. Winong 203. Kemasan 204. 442.Jl.Ki penjawi 205. Adisari 206. Pangeran Timur 207. Minggiran 208. Suripto 209. Karangkajen 210. Pamularsih 211. Sartono 212. Empu Panuluh 213. Tawangsari 214. Arjuno 215. Ki Ageng P 216. Batikan 217. Singoranu 218. Soga 219. Surokarsan 220. Wirosaban Barat 221. Ponggalan 222. Wirogunan/T 223. Singiranu 224. Pemukti 225. Leo 226. Pasopati 227. BBI Giwangan	279. Topati 280. Kap Laut Samadikun 281. Pakel 282. Perum Gambiran 283. Kmpng. Giwangan 284. Mandungan 285. Suruharjo 286. Karawitan 287. Panti Wreda 288. Kmpng.Wirosaban 289. Guno Mriko 290. Setyaki 291. Balai RK 292. Ny Adisoro 293. Pilihan 294. R Ronggo II 295. Mondorakan 296. Purbayan 297. Kresno 298. Condronegaran 299. Dongkelan 300. Modang 301. Abimanyu 302. Madubronto 303. Panti Panaungan 304. Empu Sedah 305. Kampung Ngadiwintn 306. Tegalmulyo I 307. Tritunggal 308. Pandeyan 309. Mondoliko 310. Golo 311. Sertu Harum M Ali 312. Sorosutan 313. Gambiorsawit 314. Pangeran Wirosobo 315. Landung 316. Gambiranom 317. Gurami	370. Harjowinatan 371. Swandanani II 372. Sukonandi II 373. Kapas III 374. Andong 375. Bakung 376. Menur Br 377. Kenanga 378. Balerejo I 379. Manga 380. Serma Romli 381. Utr Kec. Danurejo 382. sadewo/GK 383. Mojo I 384. Sidomukti/KG 385. Polisi Istimewa 386. Reksobayan 387. Ireda 388. Langenarjan Kidul 389. Namburan Lor 390. Suryoputra 391. Panembahan 392. Mangunegaran 393. Kenekan 394. Kauman 395. Rotowijayan 396. Taman 397. Patehan Wetan 398. Nagan Lor 399. Serangan 400. Purwodiningratian 401. Jatimulyo 402. KarangWaru Lor 403. Trimargo Wetan 404. Indrapasta 405. Turonggo	
--	--	---	---	--	---	--

	82. Gampingan 83. Pandu 84. Gedong Kiwo 85. Werkudoro 86. Lokananta 87. Bumijo Kulon 88. Pringgokusuman	138. Jl. Nagasari Lor 139. Jambon 140. Jenggotan 141. Trimargo Kulon 142. P Romo 143. Mentaok 144. Ki Pemanahan 145. Suryonegoro 146. R. Ronggo	228. HKSN Keparakan 229. Rejowinangun 230. Nogobondo 231. Pelemsari 232. R.Ronggo I 233. Ringin Putih 234. Watugilang 235. Tebu Mangli 236. Singosari 237. Kahar Muzakir	318. Margo Tirto 319. AMD 320. Saring 321. Nyi Pembayun 322. Ny Ageng Nis 323. Peleman 324. Gampingan Br. I 325. Blunyahrejo 326. Tempeyan I 327. .Mojo 328. Melati		
5.	KELOMPOK JALAN E Ruas jalan diluar kelompok A, B, C dan D					75.000,-

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

TABEL NILAI STRATEGIS

NO	KELOMPOK JALAN	LUAS REKLAME	SUDUT PANDANG	Nilai Titik	Hrg. Dsr Strategis	Nilai Strategis
1 Kelompok Jalan A						
(50 % x 10)= 5.00	$\geq 32 \text{ m}^2$	(30 % x 10)= 3.00	a. empat sisi (20 % x 8)= 1.60	9.60	95,000	912,000
(50 % x 10)= 5.00	$\geq 32 \text{ m}^2$	(30 % x 10)= 3.00	b. tiga sisi (20 % x 6)= 1.20	9.20	95,000	874,000
(50 % x 10)= 5.00	$\geq 32 \text{ m}^2$	(30 % x 10)= 3.00	c. dua sisi (20 % x 4)= 0.80	8.80	95,000	836,000
(50 % x 10)= 5.00	$\geq 32 \text{ m}^2$	(30 % x 10)= 3.00	d. satu sisi (20 % x 2)= 0.40	8.40	95,000	798,000
(50 % x 10)= 5.00	16 s.d. < 32 m^2	(30 % x 6)= 1.80	a. empat sisi (20 % x 8)= 1.60	8.40	95,000	798,000
(50 % x 10)= 5.00	16 s.d. < 32 m^2	(30 % x 6)= 1.80	b. tiga sisi (20 % x 6)= 1.20	8.00	95,000	760,000
(50 % x 10)= 5.00	16 s.d. < 32 m^2	(30 % x 6)= 1.80	c. dua sisi (20 % x 4)= 0.80	7.60	95,000	722,000
(50 % x 10)= 5.00	16 s.d. < 32 m^2	(30 % x 6)= 1.80	d. satu sisi (20 % x 2)= 0.40	7.20	95,000	684,000
(50 % x 10)= 5.00	$\leq 16 \text{ m}^2$	(30 % x 2)= 0.60	a. empat sisi (20 % x 8)= 1.60	7.20	95,000	684,000
(50 % x 10)= 5.00	$\leq 16 \text{ m}^2$	(30 % x 2)= 0.60	b. tiga sisi (20 % x 6)= 1.20	6.80	95,000	646,000
(50 % x 10)= 5.00	$\leq 16 \text{ m}^2$	(30 % x 2)= 0.60	c. dua sisi (20 % x 4)= 0.80	6.40	95,000	608,000
(50 % x 10)= 5.00	$\leq 16 \text{ m}^2$	(30 % x 2)= 0.60	d. satu sisi (20 % x 2)= 0.40	6.00	95,000	570,000
2 Kelompok Jalan B						
(50 % x 8)= 4.00	$\geq 32 \text{ m}^2$	(30 % x 10)= 3.00	a. empat sisi (20 % x 8)= 1.60	8.60	90,000	774,000
(50 % x 8)= 4.00	$\geq 32 \text{ m}^2$	(30 % x 10)= 3.00	b. tiga sisi (20 % x 6)= 1.20	8.20	90,000	738,000
(50 % x 8)= 4.00	$\geq 32 \text{ m}^2$	(30 % x 10)= 3.00	c. dua sisi (20 % x 4)= 0.80	7.80	90,000	702,000
(50 % x 8)= 4.00	$\geq 32 \text{ m}^2$	(30 % x 10)= 3.00	d. satu sisi (20 % x 2)= 0.40	7.40	90,000	666,000
(50 % x 8)= 4.00	16 s.d. < 32 m^2	(30 % x 6)= 1.80	a. empat sisi (20 % x 8)= 1.60	7.40	90,000	666,000
(50 % x 8)= 4.00	16 s.d. < 32 m^2	(30 % x 6)= 1.80	b. tiga sisi (20 % x 6)= 1.20	7.00	90,000	630,000
(50 % x 8)= 4.00	16 s.d. < 32 m^2	(30 % x 6)= 1.80	c. dua sisi (20 % x 4)= 0.80	6.60	90,000	594,000
(50 % x 8)= 4.00	16 s.d. < 32 m^2	(30 % x 6)= 1.80	d. satu sisi (20 % x 2)= 0.40	6.20	90,000	558,000
(50 % x 8)= 4.00	$\leq 16 \text{ m}^2$	(30 % x 2)= 0.60	a. empat sisi (20 % x 8)= 1.60	6.20	90,000	558,000
(50 % x 8)= 4.00	$\leq 16 \text{ m}^2$	(30 % x 2)= 0.60	b. tiga sisi (20 % x 6)= 1.20	5.80	90,000	522,000
(50 % x 8)= 4.00	$\leq 16 \text{ m}^2$	(30 % x 2)= 0.60	c. dua sisi (20 % x 4)= 0.80	5.40	90,000	486,000
(50 % x 8)= 4.00	$\leq 16 \text{ m}^2$	(30 % x 2)= 0.60	d. satu sisi (20 % x 2)= 0.40	5.00	90,000	450,000
3 Kelompok Jalan C						
(50 % x 6)= 3.00	$\geq 32 \text{ m}^2$	(30 % x 10)= 3.00	a. empat sisi (20 % x 8)= 1.60	7.60	85,000	646,000
(50 % x 6)= 3.00	$\geq 32 \text{ m}^2$	(30 % x 10)= 3.00	b. tiga sisi (20 % x 6)= 1.20	7.20	85,000	612,000
(50 % x 6)= 3.00	$\geq 32 \text{ m}^2$	(30 % x 10)= 3.00	c. dua sisi (20 % x 4)= 0.80	6.80	85,000	578,000
(50 % x 6)= 3.00	$\geq 32 \text{ m}^2$	(30 % x 10)= 3.00	d. satu sisi (20 % x 2)= 0.40	6.40	85,000	544,000
(50 % x 6)= 3.00	16 s.d. < 32 m^2	(30 % x 6)= 1.80	a. empat sisi (20 % x 8)= 1.60	6.40	85,000	544,000
(50 % x 6)= 3.00	16 s.d. < 32 m^2	(30 % x 6)= 1.80	b. tiga sisi (20 % x 6)= 1.20	6.00	85,000	510,000
(50 % x 6)= 3.00	16 s.d. < 32 m^2	(30 % x 6)= 1.80	c. dua sisi (20 % x 4)= 0.80	5.60	85,000	476,000
(50 % x 6)= 3.00	16 s.d. < 32 m^2	(30 % x 6)= 1.80	d. satu sisi (20 % x 2)= 0.40	5.20	85,000	442,000
(50 % x 6)= 3.00	$\leq 16 \text{ m}^2$	(30 % x 2)= 0.60	a. empat sisi (20 % x 8)= 1.60	5.20	85,000	442,000
(50 % x 6)= 3.00	$\leq 16 \text{ m}^2$	(30 % x 2)= 0.60	b. tiga sisi (20 % x 6)= 1.20	4.80	85,000	408,000
(50 % x 6)= 3.00	$\leq 16 \text{ m}^2$	(30 % x 2)= 0.60	c. dua sisi (20 % x 4)= 0.80	4.40	85,000	374,000
(50 % x 6)= 3.00	$\leq 16 \text{ m}^2$	(30 % x 2)= 0.60	d. satu sisi (20 % x 2)= 0.40	4.00	85,000	340,000
4 Kelompok Jalan D						
(50 % x 4)= 2.00	$\geq 32 \text{ m}^2$	(30 % x 10)= 3.00	a. empat sisi (20 % x 8)= 1.60	6.60	80,000	528,000
(50 % x 4)= 2.00	$\geq 32 \text{ m}^2$	(30 % x 10)= 3.00	b. tiga sisi (20 % x 6)= 1.20	6.20	80,000	496,000
(50 % x 4)= 2.00	$\geq 32 \text{ m}^2$	(30 % x 10)= 3.00	c. dua sisi (20 % x 4)= 0.80	5.80	80,000	464,000
(50 % x 4)= 2.00	$\geq 32 \text{ m}^2$	(30 % x 10)= 3.00	d. satu sisi (20 % x 2)= 0.40	5.40	80,000	432,000
(50 % x 4)= 2.00	16 s.d. < 32 m^2	(30 % x 6)= 1.80	a. empat sisi (20 % x 8)= 1.60	5.40	80,000	432,000
(50 % x 4)= 2.00	16 s.d. < 32 m^2	(30 % x 6)= 1.80	b. tiga sisi (20 % x 6)= 1.20	5.00	80,000	400,000
(50 % x 4)= 2.00	16 s.d. < 32 m^2	(30 % x 6)= 1.80	c. dua sisi (20 % x 4)= 0.80	4.60	80,000	368,000
(50 % x 4)= 2.00	16 s.d. < 32 m^2	(30 % x 6)= 1.80	d. satu sisi (20 % x 2)= 0.40	4.20	80,000	336,000
(50 % x 4)= 2.00	$\leq 16 \text{ m}^2$	(30 % x 2)= 0.60	a. empat sisi (20 % x 8)= 1.60	4.20	80,000	336,000
(50 % x 4)= 2.00	$\leq 16 \text{ m}^2$	(30 % x 2)= 0.60	b. tiga sisi (20 % x 6)= 1.20	3.80	80,000	304,000
(50 % x 4)= 2.00	$\leq 16 \text{ m}^2$	(30 % x 2)= 0.60	c. dua sisi (20 % x 4)= 0.80	3.40	80,000	272,000
(50 % x 4)= 2.00	$\leq 16 \text{ m}^2$	(30 % x 2)= 0.60	d. satu sisi (20 % x 2)= 0.40	3.00	80,000	240,000

NO	KELOMPOK JALAN	LUAS REKLAME	SUDUT PANDANG	Nilai Titik	Hrg. Dsr Strategis	Nilai Strategis	
5	Kelompok Jalan E						
	(50 % x 2)= 1.00	$\geq 32 \text{ m}^2$	(30 % x 10)= 3.00	a. empat sisi (20 % x 8)= 1.60	5.60	75,000	420,000
	(50 % x 2)= 1.00	$\geq 32 \text{ m}^2$	(30 % x 10)= 3.00	b. tiga sisi (20 % x 6)= 1.20	5.20	75,000	390,000
	(50 % x 2)= 1.00	$\geq 32 \text{ m}^2$	(30 % x 10)= 3.00	c. dua sisi (20 % x 4)= 0.80	4.80	75,000	360,000
	(50 % x 2)= 1.00	$\geq 32 \text{ m}^2$	(30 % x 10)= 3.00	d. satu sisi (20 % x 2)= 0.40	4.40	75,000	330,000
	(50 % x 2)= 1.00	16 s.d. < 32 m^2	(30 % x 6)= 1.80	a. empat sisi (20 % x 8)= 1.60	4.40	75,000	330,000
	(50 % x 2)= 1.00	16 s.d. < 32 m^2	(30 % x 6)= 1.80	b. tiga sisi (20 % x 6)= 1.20	4.00	75,000	300,000
	(50 % x 2)= 1.00	16 s.d. < 32 m^2	(30 % x 6)= 1.80	c. dua sisi (20 % x 4)= 0.80	3.60	75,000	270,000
	(50 % x 2)= 1.00	16 s.d. < 32 m^2	(30 % x 6)= 1.80	d. satu sisi (20 % x 2)= 0.40	3.20	75,000	240,000
	(50 % x 2)= 1.00	$\leq 16 \text{ m}^2$	(30 % x 2)= 0.60	a. empat sisi (20 % x 8)= 1.60	3.20	75,000	240,000
	(50 % x 2)= 1.00	$\leq 16 \text{ m}^2$	(30 % x 2)= 0.60	b. tiga sisi (20 % x 6)= 1.20	2.80	75,000	210,000
	(50 % x 2)= 1.00	$\leq 16 \text{ m}^2$	(30 % x 2)= 0.60	c. dua sisi (20 % x 4)= 0.80	2.40	75,000	180,000
	(50 % x 2)= 1.00	$\leq 16 \text{ m}^2$	(30 % x 2)= 0.60	d. satu sisi (20 % x 2)= 0.40	2.00	75,000	150,000

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH

Komp. Balaikota Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp.515865, 515866 Pswt 248,249 Langsung 562835

No. SPTPD :
Bulan :
Tahun :

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
UNTUK WAJIB PAJAK DAERAH
PAJAK REKLAME

Kepada Yth.

.....

Di.....

N.P.W.P.D :

PERHATIAN:

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) dengan huruf CETAK
2. Beri Nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta Jl. Kenari No. 56, Komplek Balaikota, Timoho, Yogyakarta 55165, paling lambat pada tanggal (Official Assesment) dan tanggal 20 bulan berikutnya (Self Assesment)
4. Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Data Obyek Pajak

No	Jenis Reklame & Judul (lihat keterangan)	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Sudut Pandang	Jumlah	Batas / Jangka Waktu
1.	Jenis Judul :	Status Tanah Persil Indoor Persil Halaman & Facade Persil Atas Gedung Tanah Negara	P.....M L.....M T.....M	a. Satu sisi b. Dua sisi c. Tiga sisi d. Empat sisi e. > Empat sisi s/d
2.	Jenis Judul :	Status Tanah Persil Indoor Persil Halaman & Facade Persil Atas Gedung Tanah Negara	P.....M L.....M T.....M	a. Satu sisi b. Dua sisi c. Tiga sisi d. Empat sisi e. > Empat sisi s/d
3.	Jenis Judul :	Status Tanah Persil Indoor Persil Halaman & Facade Persil Atas Gedung Tanah Negara	P.....M L.....M T.....M	a. Satu sisi b. Dua sisi c. Tiga sisi d. Empat sisi e. > Empat sisi s/d
4.	Jenis Judul :	Status Tanah Persil Indoor Persil Halaman & Facade Persil Atas Gedung Tanah Negara	P.....M L.....M T.....M	a. Satu sisi b. Dua sisi c. Tiga sisi d. Empat sisi e. > Empat sisi s/d

5	Jenis Judul : Status Tanah Persil Indoor Persil Halaman & Facade Persil Atas Gedung Tanah Negara	P.....M L.....M T.....M	a. Satu sisi b. Dua sisi c. Tiga sisi d. Empat sisi e. > Empat sisi s/d
---	------------------	--	-------------------------------	---	-------	--------------

Ukuran : P = Panjang L = Lebar T = Tinggi

KETERANGAN:

Jenis Reklame

1. Reklame Papan/ Bilboard/Cahaya Frontlight atau Backlight Kendaraan.
2. Reklame Megatron.
3. Reklame Baliho.
4. Reklame Cahaya Neonsign
5. Reklame Kain.
6. Reklame Melekat (stiker).
7. Reklame Selebaran.
8. Reklame Berjalan, termasuk pada
9. Reklame Udara.
10. Reklame Suara.
11. Reklame Film/ Slide.
12. Relame Peragaan.
13. Reklame Trivision.

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

.....
Tahun.....

.....
(Nama Terang)

C. DIISI OLEH PETUGAS KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Tata Cara Penghitungan dan Penetapan yang dikehendaki

1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Kantor Pelayanan Pajak Daerah)
2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima Tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

(.....)

Gunting

Disini.....

No. STTPD :

TANDA TERIMA :

NPWP :

.....
Tahun.....
Yang Menerima

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
Komp. Balaikota Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165
Telp. 515865, 515866 Pswt 248,249, 300, 302
Langsung 562835

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

Tahun:.....

Nama :.....

Alamat :.....

NPWP :

Menyetor berdasarkan *) SKPD STPD Lain-lain
 SKPDT SPTPD
 SKPDKB SK. Pembetulan
 SKPDKBT SK Keberatan

Masa Pajak :..... Tahun :..... No. Urut :.....

No.	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah (RP)
Jumlah Setoran Pajak			Rp.
Dengan Huruf :			

Ruangan untuk teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :, Tahun..... Penyetor (.....)
---	---	--

Catatan :

*) Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketetapan yang dimiliki

WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA

ttd

HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 23 TAHUN 2008
TANGGAL : 13 MEI 2008

BUKU WAJIB PAJAK DAERAH

NPWPD :
Nama :
Alamat :

Tanggal	No. Bukti	Uarian	SPTPD	SKPD	Ketetapan (Rp.)						Jumlah	SPTPD	Penyetoran (Rp.)						Jumlah	Sist	
					SKPDT	SKPDKB	SLPDLB	SKPDGBT	SKPN	STPD			SKPD	SKPDT	SKPDKB	SLPDLB	SKPDGBT	SKPN	STPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA

ttd

HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN VII B : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 23 TAHUN 2008
TANGGAL : 13 MEI 2008

BUKU WAJIB PAJAK DAERAH

Ayat Pajak :.....
Masa Pajak :.....

Tanggal	No. Bukti	Uarian	SPTPD	SKPD	Ketetapan (Rp.)						Jumlah	SPTPD	Penyetoran (Rp.)						Jumlah	Sist	
					SKPDT	SKPDKB	SLPDLB	SKPDGBT	SKPN	STPD			SKPD	SKPDT	SKPDKB	SLPDLB	SKPDGBT	SKPN	STPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA

ttd

HERRY ZUDIANTO

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psrt 248,249,300,302 Langsung 562835	STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut
---	---	----------

Nama :
Alamat :
.....

NPWP :
Tgl. Jatuh Tempo :

Berdasarkan Pasal 7, Pasal 10 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak :
Nama Pajak :

Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|----------|
| 1. Pajak yang harus dibayar | Rp |
| 2. Sanksi Administrasi | Rp |
| – Bunga (Pasal 10 (3)) | |
| 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) | Rp |

Dengan huruf :

Perhatian :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank.....) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Penyetor, Tahun
a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah
Kota Yogyakarta
Kepala Seksi Penetapan,

.....

.....

NIP.

.....Gunting Disini.....

No. SPTPD :

TANDA TERIMA :

NPWP :
Nama :
Alamat :

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 23 TAHUN 2008
TANGGAL : 13 Mei 2008

TABEL KERINGANAN MAKSIMAL PAJAK

No.	Misi Sosial	Skala Kegiatan		
		Lokal	Nasional	Internasional
1.	Pendidikan	100%	75%	50%
2.	Kesenian/Kebudayaan	75%	50%	30%
3.	Olahraga	75%	50%	30%
4.	Keagamaan	100%	100%	100%
5.	Terkait dengan program Pemerintah	100%	75%	50%

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO